

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

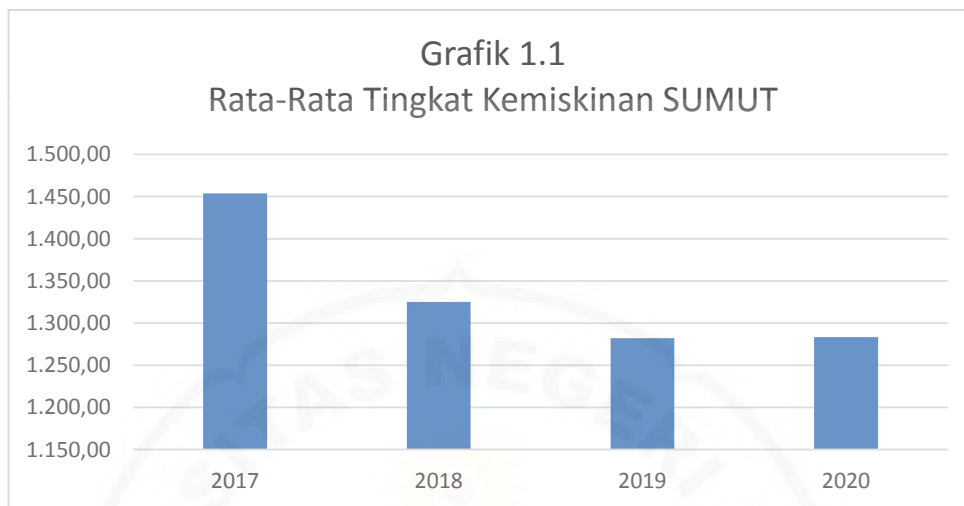
Pembangunan adalah fokus utama pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perekonomian. Tujuan utama dalam pembangunan ialah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus pula diikuti dengan penghapusan atau juga penurunan tingkat pengangguran, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Menurut pandangan ekonomi baru tentang pembangunan, suatu negara dikatakan telah mencapai pembangunan apabila ketiga masalah tersebut dapat diatasi dengan baik.

Tujuan pembangunan Indonesia sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang meliputi taraf hidup yang layak dan adil bagi rakyat. Pembangunan daerah dilaksanakan secara berkelanjutan yang terpadu sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah, serta akar dan tujuan pembangunan nasional ditentukan oleh pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah menurunnya jumlah penduduk miskin (Simatupang dan Saktyanu, 2003).

Kemiskinan adalah sebuah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait : Tingkat pendapatan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses mengenai barang dan jasa, lokasi, geografi, jenis kelamin, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi hanya dipahami sebagai ketidakmampuan

ekonomi, tetapi Juga gagal untuk mewujudkan hak-hak dasar dan perlakuan yang berbeda dari seseorang atau sekelompok orang yang hidup bermartabat. Baik Prinsip dasar yang diakui meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya Rasa aman dari alam, lingkungan, dan bebas dari perlakuan atau kekerasan, Dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Putra 2015, hlm. 2).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Kualitas sumberdaya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.



Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara menjadi 10,53% atau 1,46 juta jiwa. Pada september 2018 terjadi penurunan persentase penduduk miskin menjadi 10,79% atau 1,32 juta jiwa dan pada Maret 2019 terjadi lagi penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara menjadi 8,83% atau 1,28 juta jiwa. Pada Maret 2020 terjadi lagi peningkatan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara menjadi 8,75% atau 1,28 juta jiwa.

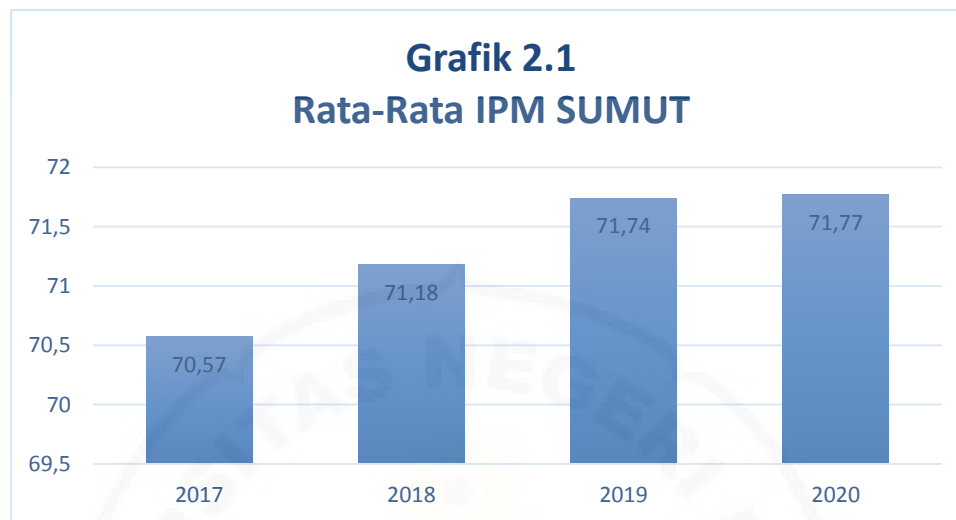
Dari Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa, angka kemiskinan di Sumatera Utara secara umum terjadi fluktuasi turun naik dalam jumlah maupun persentase pada periode tahun 2017 hingga tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) fluktuasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak serta dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya

terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat.

Lanjouw dkk (dalam Yani Mulyaningsih, 2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah faktor penting yang identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan (Andhykha et al., 2018).

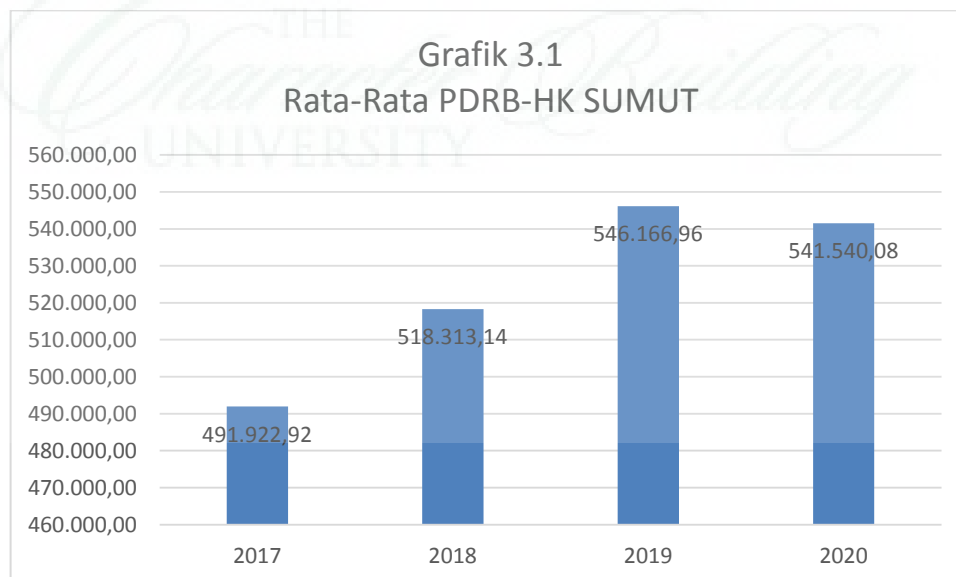
IPM yang merupakan tolak ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah (Kurnia Lismawati, 2007).



Dilihat dari Grafik 1.2, rata-rata IPM Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 70,57% ditahun 2017, 71,18% ditahun 2018, 71,74% di tahun 2019 dan 71,70% ditahun 2020. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya, terlihat bahwa data IPM seluruh Kabupaten/Kota dan data rata-rata Provinsi Sumatera Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut bertolak belakang dengan teori yang menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai IPM maka semakin rendah angka kemiskinan. Maka dapat disimpulkan bahwa IPM tidak terlalu berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) peningkatan pencapaian IPM tahun 2017-2020 di Sumatera Utara didukung oleh peningkatan semua faktor pembangunan manusia di Provinsi tersebut diantaranya yaitu: (1) Faktor umur panjang dan hidup sehat yang diukur dari umur harapan hidup (UHH), (2) Faktor pendidikan dan harapan lama sekolah (HLS) ,serta (3) Faktor hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil perkapita. Kota medan memiliki skor IPM tertinggi di Sumatera Utara. Sementara IPM terendah di tempati oleh kabupaten Nias Barat.

PDRB merupakan salah satu dari indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah . PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai jenis kegiatan ekonomi di suatu wilayah selama periode tertentu. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar potensi sumber pendapatan daerah (Hadi Sasana 2006 dalam Saputra 2011).

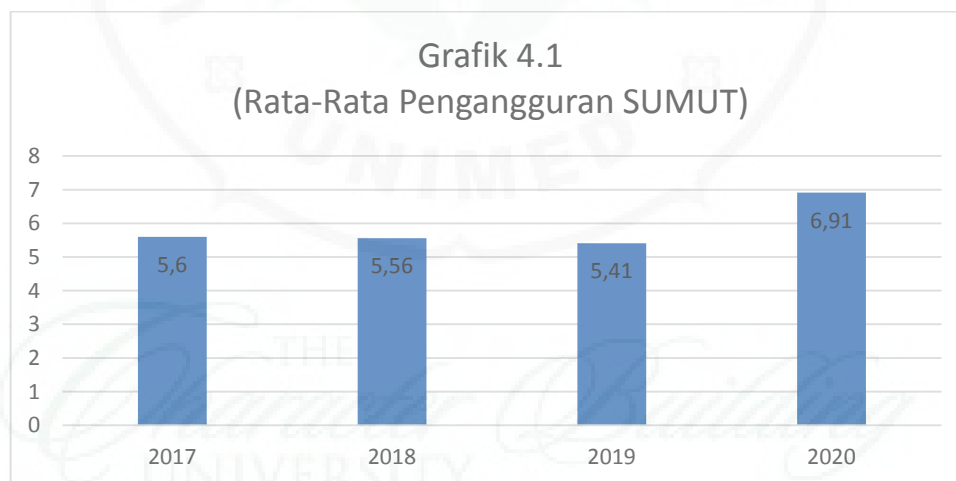
Menurut World Bank (2004), salah satu faktor kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB. Nilai PDRB yang tinggi menunjukkan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu daerahnya tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang melakukan kegiatan produksi sehingga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, yang artinya semakin tinggi nilai PDRB maka tingkat kemiskinan semakin menurun (Whisnu Adhi Saputra 2011).



Pada Grafik 1.3 terlihat bahwa rata-rata PDRB-HK Provinsi Sumatera Utara mengalami perubahan naik turun disetiap tahun nya, dimana pada tahun 2017 yaitu sebesar 491.922,92 miliar rupiah, lalu meningkat sebesar 518.313,14 pada tahun 2018, kemudian di tahun 2019 naik lagi sebesar 546.166,96 dan di tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 541.540,08 miliar rupiah. Jika dibandingkan antara tabel 1.1 dengan tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa data kemiskinan dan PDRB seluruh Kabupaten/Kota dan rata-rata Provinsi Sumatera Utara dinyatakan selaras dengan teori, dimana pada teori dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai PDRB maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Dan terbukti pada tabel 1.1 dan tabel 1.3 yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Utara menurun saat PDRB meningkat (2017-2019) serta tingkat kemiskinan akan meningkat jika nilai PDRB menurun (2020) yang artinya terjadi kesesuaian antara teori dengan data. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dari sisi produksi, fluktuasi naik turun tersebut disebabkan oleh penurunan pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami penurunan akibat dari dampak Covid-19 yang melanda Indonesia. Sedangkan dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami perlambatan. Terlihat bahwa nilai PDRB terendah diduduki oleh kabupaten Pakpak Bharat dan PDRB tertinggi diduduki oleh Kota Medan.

Larasati Prayoga dkk (2021) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran dan berdampak

langsung pada tingginya kemiskinan (O'Campo et al., 2015). Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan sangat erat, seseorang yang menganggur tentu tidak memiliki penghasilan. Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Dalam hal ini ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Hubungan yang positif antara kemiskinan dan pengangguran tersebut ditemukan di beberapa negara. Kajian yang mendukung teori ini dilakukan di Nigeria dengan menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun, Osinubi (2005).



Grafik 1.4 menjelaskan bahwa rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan di 3 tahun berturut yaitu tahun 2017 sebesar 5,60%, tahun 2018 sebesar 5,56 dan tahun 2019 sebesar 5,41 lalu pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 6,91% dan juga menjelaskan bahwa seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi turun naik yang

artinya terjadi keselarasan antara teori dengan data kemiskinan dan pengangguran, dimana pada teori menjelaskan bahwa ketika pengangguran naik, maka kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut menurun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Meningkatnya jumlah pengangguran di Sumatera Utara dapat di picu dari beberapa faktor seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), banyaknya angkatan kerja baru sedangkan jumlah kebutuhan kerja tidak bertambah atau faktor lainnya seperti dampak Covid-19 yang melanda Indonesia. Persentase penyumbang pengangguran terbanyak yaitu: Tebing Tinggi, Medan dan Sibolga. Sedangkan persentase terendah yaitu: Humbang hasunduttan, Pakpak Bharat dan Nias.

Dari uraian diatas terlihat bahwa fenomena fluktuasi kemiskinan di Sumatera Utara masih cukup tinggi dibandingkan dengan 34 provinsi di Indonesia dan beberapa provinsi di Sumatera. Sebaliknya pandemi Covid-19 telah menaikkan angka kemiskinan dan menjadi fokus upaya pemerintah mengatasi kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, kemiskinan tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk dan peningkatan kesempatan kerja. Dampak kemiskinan terhadap perekonomian sangat merugikan dan untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kemiskinan di Sumatera Utara.

Dari Uraian tersebut, penulis tertarik dan ingin melihat sejauh mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto-Harga Konstan (PDRB-HK) dan Pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah bahwa :

1. Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi yang artinya banyak faktor yang menyebabkan fluktuasi tersebut.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan secara terus menerus. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan, tidak terjadi kesesuaian antara data dengan teori yang artinya faktor IPM tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi naik turun. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan, terjadi kesesuaian antara data dengan teori yang artinya PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.
4. Tingkat pengangguran dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi naik turun. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan, terjadi kesesuaian antara data dengan teori yang artinya pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi serta memperdalam penelitian, penulis memperkecil cakupan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan

Pengangguran yang dapat mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Kemiskinan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Kemiskinan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Kemiskinan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat di tulis tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara
4. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti dalam masalah kemiskinan, serta merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan.
2. Sebagai masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti-peneliti lain untuk menulis topik yang sama.